

Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.



# PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SESUAI NILAI PANCASILA





## Dr. Nanik Sutarni S.H, MH

Dr. Nanik Sutarni S.H, MH Lahir di Biyolali, 19 juli 1965. Sejak kecil bercita-cita menjadi seorang guru SD dan jadi penegak hukum, sempat berhenti kuliah karena fokus pada keluarga, kemudian bisa berlanjut kuliah sampai jenjang S2. Di situlah awal karier menjadi asisten dosen selama 4 tahun. Kemudian menjadi Dosen tetap di Universitas Boyolali. Sejak 2006 sampai awal 2007 menjadi kaprodi FH UBY, kemudian pada tahun 2012 menjadi Dekan FH UBY sampai 2021. Pada tahun 2014 diberi tugas tambahan menjadi dekan Fakultas Ekonomi sampai 2019. Kosentrasi Bidang hukum adalah hukum perdata, namun disertasi mengenai hukum agraria maka bertambah kosentrasi pada Hukum administrasi Negara karena Kedua Bidang hukum tersebut saling berkaitan, menjadi dosen adalah anugerah yang indah bagi saya karena selain cita-cita sejak kecil menjadi guru bisa mentransfer ilmu yang ada kepada siapa saja yg membutuhkan sehingga hidup bermanfaat

**PENGADAAN TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM SESUAI NILAI  
PANCASILA**

Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
SESUAI NILAI PANCASILA**

**Penulis** : Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.

**Editor** : Dr Burham Pranawa S.H, M.H.

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Herlina Sukma

**ISBN** : 978-623-151-908-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sesuai Nilai Pancasila”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini akan mengulas dalam rekonstruksi hukum yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terutama yang berkaitan dengan implementasi keadilan Pancasila. Sehingga regulasi yang mengatur tentang pengadaan tanah dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak pemilik tanah demi terwujudnya keadilan sesuai cita-cita bangsa Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 PANCASILA SEBAGAI LANDASAN BANGSA DAN NEGARA.....</b>	<b>14</b>
A. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Bangsa .....	14
B. Nilai-Nilai Pancasila dalam Bernegara.....	22
<b>BAB 3 PANCASILA DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN .....</b>	<b>25</b>
A. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan .....	25
B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik. ..	27
C. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi	27
D. Pancasila sebagai Paradigma Penegakan Hukum.....	28
<b>BAB 4 TEORI KEADILAN .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB 5 PENGADAAN TANAH.....</b>	<b>70</b>
A. Sejarah Pengadaan Tanah.....	70
B. Perbandingan Pengadaan Tanah di Indonesia dan Malaysia .....	98
C. Hak Menguasai Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. ....	106
D. Konsep Kepentingan Umum.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>148</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Tingkatan Partisipasi Arnstein.....	69
---	----



---

**PENGADAAN TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM SESUAI NILAI  
PANCASILA**

Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H..



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Tanah sebagai karunia Tuhan yang *ultra essential* bagi kehidupan, khususnya kehidupan manusia, mengingat sebagian besar kehidupan baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik bergantung pada tanah. Tanah juga mempunyai nilai kerakyatan sehingga baik dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan maupun penerapan kebijakannya perlu dilakukan dengan cara musyawarah tanpa keputusan sepihak, tanpa ada tekanan fisik, senjata, penganiayaan tubuh, perusakan harta, tekanan moril, ancaman keamanan dan sebagainya. Di dalam tanah juga terkandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan memihak pada rakyat. Nilai-nilai tersebut merupakan *grund norm* atau norma dasar bagi bangsa Indonesia untuk bertindak dan berperilaku serta untuk dijadikan pedoman dan landasan bagi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Selain itu tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi guna kesejahteraan rakyat. Karena kegunaannya yang sangat strategis dan ketersediaannya terbatas, maka sering kali terjadi perselisihan penguasaan dan pemilikan tanah.

Sebagai sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Penggunaan tanah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat harus didukung dengan pelestarian yang baik, agar tanah serta ekosistem yang ada didalamnya tidak mudah rusak atau punah. Mengingat

# BAB 2

## PANCASILA SEBAGAI LANDASAN BANGSA DAN NEGARA

### A. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Bangsa

Pancasila merupakan sebuah sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai luhur Pancasila tersebut telah tertanam dalam pribadi masyarakat bangsa Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan nusantara. Nilai-nilai luhur tersebut kemudian dipelajari dan dirumuskan menjadi suatu tatanan norma dan nilai yang disebut Pancasila. Konsep perumusan Pancasila sendiri mempunyai sejarah yang panjang sampai akhirnya dijadikan sebagai akta pendirian Negara Indonesia dan "*Staat fundamental norm.*" Secara etimologi Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yaitu "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti dasar. Pancasila terdiri dari lima sila/dasar, yang mana setiap sila saling berkaitan satu sama lain.

Pada tanggal 1 Maret 1945 Saiko Syikkikan, Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Cosakai atau biasa disebut Badan Penyelidik Usaha -Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Sidang BPUPKI dibagi dalam dua periode, sidang pertama dari tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945 dan sidang kedua dari tanggal 10 Juli 1945-17 Juli 1945.

Istilah Pancasila lahir dari gagasan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno pada saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai lima hal yang menjadi dasarnegara merdeka, yaitu:

# BAB 3

## PANCASILA DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN

### A. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan.

Kata paradigma berasal dari Bahasa Inggris “paradigma” yang berarti model, pola atau contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pancasila merupakan sebuah paradigma, dikarenakan Pancasila dijadikan sebagai landasan, acuan, metode, nilai dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.

Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memiliki paradigma Pancasila dalam merumuskan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam mensejahterakan serta memberikan keadilan kepada masyarakat. Negara dalam mengambil kebijakan guna menjawab permasalahan-permasalahan yang ada harus memiliki paradigma Pancasila dalam mengambil sudut pandang guna menjalankan kewenangannya.

Paradigma dapat diartikan sebagai kerangka berpikir, kerangka bertindak, acuan, sumber, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan. Pancasila sebagai suatu paradigma merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur,

# BAB

# 4

## TEORI KEADILAN

Asas, nilai dan norma merupakan suatu hierarki, asas merupakan landasan pertimbangan bagi pembentukan norma hukum dan merupakan kaedah yang fundamental serta menjadi pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu sistem hukum yang dirumuskan menjadi aturan- aturan perundang-undangan. Asas (*Principle*) memiliki fungsi sebagai bahan pertimbangan oleh pembentuk undang-undang dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan nilai tidak berhubungan secara langsung terhadap norma. Nilai (*Value*), kata nilai merujuk pada sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai merujuk pada suatu yang diupayakan untuk tercapainya, dijunjung tinggi, dan dipertahankan bersama oleh suatu kelompok orang-orang atau masyarakat.

Salah satu tujuan dari pada adanya hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Jenis pertama yaitu keadilan umum atau keadilan legal yang berarti keadilan yang berdasar undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Apa yang disebut keadilan itu adalah apa yang menjadi keinginan publik atau negara, tetapi juga yang dikehendaki setiap warga negara.

# BAB

# 5

## PENGADAAN TANAH

### A. Sejarah Pengadaan Tanah

#### 1. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Pengaturan masalah pengambilan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Padazaman ini dikenal adanya prosedur pencabutan hak dan prosedur pembebasan hak atas tanah yang diatur dalam dua peraturan. Peraturan pertama yang termuat dalam *Gouvernements Blesluit* (Keputusan Gubernur/Pemerintah) tanggal 1 Juli 1927 Nomor 7 (*Bijblad* Nomor 11372), dan yang termuat didalam *Gouvernements Besluit* (Keputusan Gubernur/Pemerintah) tanggal 8 Januari 1932 Nomor 23 (*Bijblad* 12746) sedangkan peraturan kedua adalah *Onteigenings Ordonnantie* yang termuat didalam *Staatsblad* Nomor 574 Tahun1920.

Peraturan perundang-undangan yang pertama, mengatur tentang pembebasan tanah yakni mengatur tentang perolehan hak atas tanah secara dua pihak artinya dilakukan pertemuan kehendak kedua belah pihak (musyawarah) yaitu pihak yang menghendaki tanah dan pihak lain adalah pemilik tanah tersebut. Apabila persetujuan kedua belah pihak tidak menghasilkan kata sepakat atau karena adanya suatu keberatan besar yang tidak dapat diatasi dalam persetujuan tersebut, maka digunakan peraturan yang kedua, yaitu *Onteigenings Ordonnantie*(ordonansi Pencabutan Hak Atas Tanah) yaitu pengambilan hak atas benda (tanah)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- \_\_\_\_\_. 2011. *Sosiologi Hukum*. Cet. Ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta:Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Masalah-masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannya dengan hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah*. Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-11. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Hukum UUPA*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah: Suatu Studi Perbandingan*. Bandung: Bandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Berakhirnya Hak-Hak Aats Tanah menurut Sistem UUPA*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus-KasusPertanahan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- \_\_\_\_\_. 2005 *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan HukumIndonesia.

- \_\_\_\_\_. 2005. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru untuk*
- \_\_\_\_\_. 2005. *Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: LPHI.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Cet. Ke-1. Jakarta: SinarGrafika.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Pelaksanaan Pengaturan Hak Mengusai Negara atas Tanah menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. dalam Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-7., Jakarta: SinarGrafika.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Catatan Akhir Tahun 2014: "Membenahi Masalah Agraria"*. Jakarta:KPA.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Catatan Akhir Tahun 2016: "Liberlisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokan"*. Jakarta:KPA.
- \_\_\_\_\_. dalam H. Abdurahman. 1996. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- \_\_\_\_\_. dan Gunawan, Markus. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- \_\_\_\_\_. 1974. *Politik Hukum dan Pembangunan Agrariadi Indonesia*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Masalah Perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di negara kita*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Cetakan Pertama, Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: Citra AdityaBakti.

- \_\_\_\_\_. 1991. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Bandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Beberapa Pokok Pikiran*, diedit oleh Sri Edi Swasono & Fuzie Ridjal. Jakarta: UI-Press.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Edisi Revisi*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Hukum Agraria serta Land Reform*. Bandung: Bandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Cetakan Kedua, Pratnya Pramita.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Strategi Memmbangun Ekonomi Rakyat dalam Politik Ekonomi Indonesia Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna Dan Hak Guna Bangunan*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.

- \_\_\_\_\_. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penenerpan Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Konstitusi Ekonomi*. Kompas. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Surabaya: Untag Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: FH Unika Parahyangan.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta:Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: PustakaMargaretha.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Bank Tanah*. Jakarta: PustakaMargaretha.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Opini Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.2014.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy dan Public Policy)*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria*.
- \_\_\_\_\_.1988. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Cet. Ke-1 Jakarta:Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_.2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang.
- \_\_\_\_\_.2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- \_\_\_\_\_.2014. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*. Jala Permata Aksara. Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 1994. *Bunga Rampai Hukum Agraria serta Land Reform*. Bandung: Bandar Maju.
- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Cet. Ke-1. Jakarta: Media Grafika.
- Abdullah, Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah "Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan"*. Ujung Pandang: Persadi.
- Abdurrahman. 1991. *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad, Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Bayu Media. Malang.
- Admosudirjo, Prajudi. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Al. Wisnubroto. 2010. *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-8. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali, Achmad. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ali, Chidir. 1979. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria*. Bina Cipta. Bandung.
- Anaifo, David. 2015. "Land Reform sand Land Rights Change: a Case Study of Land Stressed Groups in the Nkoranza South Municipality". *Ghana, Land Use Policy*: Elsevier.
- Apeldoorn, Van. 1995. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.
- Araf, Al dan Awam Prayudi. 2002. *Perebutan Kuasa Tanah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Ardiwilaga, R. Roestandi. *Hukum Agraria Dalam Teori dan Praktek*. Masa Baru. Jakarta. 1962.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*

- Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. Ke-3. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Arif. 1994. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Arizona, Yance. 2013. *Konstitusionalisme Agraria*. Jakarta: Setara Institute.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Atmadja, I Gede Dewa. 2013. *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*. Setara Press. Malang.
- Atmoredjo, Sudjito. 2010. *Ideologi Pancasila: Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*. Lingkar Media. Yogyakarta.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. Ke-10. Jakarta: Ghalia Utama.
- Bachriadi, Dianto & Gunawan Wiradi. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).
- Bachriadi, Dianto. 1997. *Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, Agendan Pembaharuan Agraria di Indonesia*. Jakarta: KPA & Lembaga Penerbit FE UI.
- Bakri, Muhammad. 2002. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*. Jakarta: Buku Kita.
- Basarah, Ahmad. 2017. *Bung Karno, Islam, dan Pancasila*. Konstitusi Press (Konpress). Jakarta.
- Basyir, Kumawi dkk. 2013. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Sunan Ampel Press. Surabaya.
- Bawsir, Revrison. 1995. *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, dalam Bawsir. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*.

Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Bisri, Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyono, Kabul. 2009. *Pendidikan Pancasila*. Bandung: Alfabeta.
- Burhanudin, Salam. 1985. *Filsafat Pancasilaisme*. Bandung: Bina Aksara.
- Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Darmodiharjo, Dardji dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewantara, Agustinus W. 2017. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Jakarta: Kanisius. 2017.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-7. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ediwarman. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya*. Bandung: Alumni.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Eka, Irene Sihombing. 2009. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Erwiningsih, Winahyu. 2009. *Hak Mengusai Negara atas Tanah*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Total Media.
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang-Education.

- Fauzi, Noor & Juliantara, D. 2000. *Menyatakan Keadilan Agraria*. Bandung: BP- KPA.
- Fauzi, Noor. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Asia Tenggara UGM dan Putaka Pelajar.
- Friederich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W.Norton and Co.
- Fuadi, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Gautama, Sudargo & Ellyda T. Soetjiarto. 1997. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Giddens, Anthony dan Turner, Jonathan. 2008. *Social Theory Today*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gie, The Liang. 2001. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Sumber Sukses.
- Gijssel, Jan dan Hocke, Mark van. 1981. *Wat is Rechtsteorie*. Antwerpen.
- Ginting, Darwin. 2013. *Kapita Selektta Hukum Agraria*. Jakarta: Fokusindo Mandiri.
- Gunadi, Tom. 1995. *Ekonomi dan Sistem Ekonomi menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945*. Bandung: Angkasa.
- Gunanegara. 2008. *Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: TataNusa.
- Haar, Ten, dikutip dari John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan* (Jakarta, Sinar Grafika 2007).
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hakim, Abdul. 1988. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan LBHI.

- Haliim, Wimmy, 2014, *Bangkitlah Pancasila sebuah gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Malang: UBPress.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Harahap, M Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Harsono, Boedi. 1995. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Hasan, Tholalah. 1999. *Pertanahan dalam Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslim*. Yogyakarta: STPN.
- Hasyim, Purba & Syafruddiin Kalo. 2006. *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan*. Medan: Cahaya Ilmu.
- Hatta, Muhammad. 2005. *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Hendrojono. 2005. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Srikandi.
- Husni, M. 2003. *Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum*. Equality.
- Husni, Lalu. 2010. *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hutagalung, Arie Sukanti. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia: Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Program Tanah dan Pemilikan Tanah*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Hutagalung, Arie S. et al., 2011. *Hukum Pertanahan di Belanda dan di Indonesia*. Bali: Pustaka Larasan.
- Ibrahim, Johnny. 2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum : Teori dan Implikasi Penerapannya dalam penegakan Hukum*, Surabaya : Putra Media Nusantara dan ITS Press.
- Iskhandarsyah, Mudzakir. 2010. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

- Ismail, Nurhasan. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik*. Jakarta-Yogyakarta: Huma dan Magister Hukum UGM.
- J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya.
- J.H.P. Mr. *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland, zevende druk*, Dekker & van de Vegt NV, Nijmegen Utrecht, 1951. dalam Mariam Darus Badruzaman. 1997. *Mencari Sistem Hukum Nasional*. Cet. Ke-1. Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Bandung: Alumni.
- Jazim, Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Press dan Citra Media. Jakarta dan Yogyakarta.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kalo, Syafrudin. 2004. *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria* (Keppres No. 55 Tahun 1993, pasal 1). Jakarta. Sinar Grafika.
- Kartasapoetra, G. dkk. 1985. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasim, Ifdhal & Endang Suhendar. 1996. *Tanah Sebagai Komoditas Strategis: Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. Jakarta: Elsam.
- Kepala Staff Kepresidenan. 2019. *Menyempurnakan Landasan Infrastruktur, Membangun Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kantor Staff Kepresidenan.
- Kitay, Michael G. dalam Oloan Sitorus & Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2013. *Laporan Akhir Tahun 2013: "Warisan Buruk Masalah Agraria di Bawah Kekuasaan SBY"*. Jakarta: KPA.
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PPM.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1996. *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Mizan. Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang". *Makalah*, Jakarta, 11 Desember 1995.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Abdul dan Ali, Hasbi. 2011. *Politik Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Limbong, Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan: Regulasi, Ganti Kerugian, Penegakan Hukum*. Margaretha. Jakarta.
- Lounela, Anu & R. Yando Zakaria. 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampu dan Kampung*. Jakarta: Insist kerjasama dengan KARSA.
- Lubis, Solly. 2000. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Mandar Maju. Lubis, M.Yamin & A. Rahim Lubis. 2011. *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Lukito, Ranto. 2002. *Saatnya Mengkaji Ulang UUPA*. Montreal: McGill University.
- Lunis, Suhrawardi K. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

- M.D, Moh. Mahfud. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2006. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*, edisi revisi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mahendra, A.A. Oka. 1996. *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi Dan Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahendra, A.A. Oka & H. Hasanudin. 1997. *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Manikgeni.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1996. *Dinamika Tatanegara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sunoto. 1989. *Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika*. Yogyakarta : Hinindita.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Gradika.
- Mansyur, M. Ali. 2006. *Aneka Persoalan Hukum*. Semarang: Sultan Agung Press.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Cet. 5, Lieberty.
- Marmmin, M. Roosadijo. 1979. *Tinjauan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda- Benda yang Ada di Atasnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marsoem, Sujarwo Wahyono Adi dan Pieter G. Manopo. 2015. *Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah*. Jakarta: Rene Book.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Mas'oe'd, Muchtar. 1997. *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Matroji. 2009. *Sejarah*. Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, Mr. A. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti Kerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Peerbit Liberty.
- Moleong, Lexi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto dan Hamid, Edy Suandi. 1987. *Meningkatkan Efisiensi Nasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Muchsan. 2007. *Perbuatan Pemerintah dalam Memperoleh Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Muchsin dan Koeswahyono, Imam. 2008. *Aspek Kebijakan, Hukum Penatagunaan Tanah & Penatan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudakir, Berhand. 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Muhadar, Rasnaningsih. 2006. *Viktisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Muladi dan Diah Sulistyani. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Alumni. Bandung.
- Muliawan, Jarot Widya. 2016. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Yogyakarta: Litera.
- Murat, Rusmadi. 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung: MandarMaju.
- Mustafa, Bachsan. 1985. *Hukum Agraria dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Bandung: Remadja Karya.
- Mustofa & Suratman. 2013. *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*. Jakarta: Sinar Garfika.

- Ngurah Tara Wiguna, I Gusti. 2009. *Hak-Hak Atas Tanah Pada Masa Bali Kuna Abad X-IX Masehi*. Bali: Udayana University Press.
- Nonet, Philip dan Selznick, Philip. 2010. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.
- Noor, Aslan. 2006. *Konsep Hak Milik Atas Tanah bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Notohamidjojo O, .1967. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Notonagoro. 1981. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet.Ke-10*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Nurjahjo, Hendra. 2008. *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Parlindungan, A.P. 1978. *Berbagai Aspek Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung:Alumni.
- Perangin, Efendi. 1991. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi*. Jakarta: Rajawali.
- Poespowardoyo, Soerjanto. 1989. *Filsafat Pancasila*. Gramedia. Jakarta. Poespowardjojo, Soerjanto. 1994. *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Gramedia. Jakarta.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. CV.Pustaka Setia Bandung. Prasetyo, Teguh dan Purnomosidi, Arie. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, dan ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prof. Dr. Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban*.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjdo, Satjipto, Mompang L Panggabean (Editor). 2006. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban, Cet. I*. UKI Press. Jakarta.

- Rajagukguk, Erman. 2011. *Butir-butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- Rapar, J.H.2019. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press.
- Reformasi Agraria*). Jakarta: Citra Medika.
- Rita, Maria Ruwiasuti. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan KPA Press.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Roeslan Abdulgani. 1992. *Pemikiran Ideologi Pancasila (suatu alternatif)*. Surabaya: Laboratorium Pancasila IKIP Malang Usaha Nasional Surabaya.
- Roosdiono. 2018. *Undang-Undang Pertanahan yang Baru*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosadi, Otong dan Desmon, Andi. 2013. *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum Edisi II*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rosadi, Otong. 2011. *Quo Vadis, Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rubai, Achmad. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah*. Malang: Bayu Media.
- Ruslina, Elli. 2013. *Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Jakarta: Total Media.
- Rusmadi, Murad. 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Safik, Akhmad. 2006. *Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi FHUI.
- Said, Umar dan Suratman. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah*. Cet. Ke-1. Malang: Setara Press.

- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta. UII Press.
- Salindeho, John. 1991. *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salle, Aminudin. 2007. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Salman, Otje dan Susanto, Anthon F. 2008. *Teori Hukum“Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali”*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Samekto, Adji. 2008. *Justice Not for All: Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Yogyakarta: Genta Press.
- Santoso, Urip. 2006. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenada Media.
- Sarjito. 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugu Jogja.
- Sarkawi. 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Schmid, Von, *Ahli Pemikir Besar Negara dan Hukum, Pembangunan*, Jakarta, 1954.
- Sembiring, Julius. 2012. *Tanah Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Setiawan, Usep. 2010. *Kembali ke Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kanisiun. Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, Bina Cipta, 1987).
- Sidharta, Benard Arief. 2003. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta, Genta Publishing.

- Sihombing, Jonker. 2010. *Peranan dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Bandung:Alumni.
- Sihombing, B.F. 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah di Indonesia*. Jakarta: GunungAgung.
- Sihombing, Irene Eka. 2009. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah*. Jakarta: UniversitasTrisakt.
- Simamarmata, Ricardo. 2002. *Kapitalisme Perkebunan: Dinamika Kepemilikan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simorangkir, J.C.T. dalam Tarmizi, *Segi-Segi Hukum Penggunaan Konsinyasi Dalam Pembebasan Tanah Di kota Medan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, USU, Medan,1995.
- Sitorus, Oloan & Balans Sebayang. 1996. *Konsolidasi Tanah Perkotaan*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sitorus, Oloan & Zaki Sireead. 2006. *Hukum Agraria di Konsep Dasar dan Implementasi*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sitorus, Oloan & Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Slaats, Herman. Et.al. 2007. *Masalah Tanah di Indonesia dari Masa ke Masa*.Jakarta: Lembaga Studi Hukum Ekonomi FH UI.
- Sodiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soedharyo Soimin. 2004. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono. 1998. *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.

- Soemardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Kompas Media Nusantara.
- Soemito, Rochmat. 2013. *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Refika Ofset, Bandung, 1991. Sebagaimana dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Cet.Ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1991. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghallia Indonesia.
- Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka.
- Soetikno, Iman. 1987. *Proses Terjadinya UUPA, Peran serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soimin. 2001. *Status Hak dan Pembasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sony Keraf. 1997. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Cet. Ke-19. Jakarta: Intermedia.
- Sudarsono. 2001. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudiyo. 2002. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta.
- Sudjarwo, Masroem, dkk. 2015. *Panduan Lengkap: Ganti Untung Pengadaan Tanah, Memetakan Solusi Strategis Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Jakarta: Renebook.
- Sudjito, et. al. 2011. *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan, dan Pendayagunaan Tanah Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Suharningsih. 2009. *Tanah Terlantar*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet.

- Suharto. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: LSP Press.
- Suhendar, Endang & Yohana Budi Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Suhendar, Endang. 2002. *Menuju Keadilan Agraria (70 Tahun Gunawan Wiradi)*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Sumardjono, Maria S.W. et.al. 2009. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertanahan*. Jakarta: BPHN.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sumber, Aziz Abdul Hussein. 1996. *Undang-Undang Perolehan dan Pengambilan Tanah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa. Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surabaya: ATR bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Suryanto, dkk. 2001. *Studi Identifikasi dan Inventarisasi Masalah Pertanahan*.
- Susanto, Anthon F. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sutedi, Adrin. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Suteki. 2010. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*. Semarang: Surya Pena Gemilang.
- Sutiksno. 2003. *Filsafat Hukum*, Cet. Ke-8 Jilid II. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Sutrisno, Slamet, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2006.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2015. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Permata Aksara.
- Syam, H.M. Noor. 2010. "Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional)", edisi II. Laboratorium Pancasila. Malang.
- Syamsi, Ibnu. *Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsuddi, Aziz. 2011. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief, Elza. 2012. *Manuntaskan Sengketa Tanah*. Jakarta: Gramedia.
- Tafsir, Ahmad. 2007. *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: Rosda karya.
- Tanya, Bernard L. 2001. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tanya, Bernard L. *et al.*, 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Taopan, M. 1992. *Keunggulan Pancasila Sebagai Filsafat Ketatanegaraan*. Bandung: Citra Adya Bakti.
- Tauchid, Muhammad. 2009. *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Thaib, Dahlan Jazim Hamidi dan Huda, Ni<sup>matul</sup>. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Cet. Ke-10. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thaib, Dahlan. 2000. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Cet. Ke-1 Yogyakarta: Liberty.

- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Tobroni dkk. 2007. *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*. Pusapom. Malang.
- Tukgali, Lieke lianadevi. 2010. *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Kertas Putih Communication.
- Ulmunir, Misbah. 2006. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Unger, Roberto M. 2011. *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Nusa Media, Bandung, 2011. Terjemahan dari Roberto M. Unger. *The Critical Legal Studies Movement*. London: Cambridge University Press.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. 2019. *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Yogyakarta: Phoenix Publisher.
- Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat (Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research))*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Loon, JF. Glastra dalam Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Vollenhoven, Cornelis van. 2013. *Orang Indonesia dalam Tanahnya (De Indonesieren Zijn ground)*. Yogyakarta: STPN Press.
- W. Friedman. 1960. *Legal Theory, Fourth Edition*, Stevens and Son Limited.London.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, Warassih, Esmi. 1991. *Pranata Hukum: Sebuah Kajian Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah (Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)*. Cet. Ke-1. Malang: BayumediaPublishing.
- Wijk, Van dalam Koentjoro Porbopranoto, *Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1956.
- Winangun S.J., Wartaya. 2004. *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Pola-Pola Penguasaan Tanah di Desa Cimanuk: Catatan Sementara, Dikutip dari Moh. Sohibudin, Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraria*. Yogyakarta:STPN.
- Wiryani, Fifik. 2009. *Reformasi Hak Ulayat*. Malang: Setara Press.
- Yamin, Muhammad. 1954. *Proklamasi dan Konstitusi*. Jakarta: Djembatan.
- Yusriadi. 2010. *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 38.
- Yusriyadi. 2010. *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zakie, Mukmin. 2013. *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Zaman, Nurus. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

## **Jurnal**

- Amir, Syafruddin. 2013. "Pancasila As Integration Philosophy of Education And National Character". *International Journal of Scientific & Technology Research*. Vol. 1 Issue 1.
- Asyhari, Masyhud. 1991. "UUPA: Antara Idealita dan Realita", *JurnalUnisia*. Vol. 3 No. 16.

- Chomzah dalam Ratna Artha Windari. 2014. "Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 3 No.1.
- Endrawati, Netty. 2004. "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Nasional menurut Kepres No. 55 Tahun 1993 Juncto Kepres No. 34 Tahun 2003". *Jurnal Legality*. Vol. 12. No.2.
- Febriansyah, Irawan, Ferry. 2017. "Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13 No.15.
- G Kitay, Michael dalam Sutedi, Adrian. 2011. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. dalam Christiana Tri BudhAyati, "Kriteria Kepentingan Umum dalam Peraturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*.
- Herawatin, Yunie. 2014. "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila". Vol. 18 No.1.
- Irawan, Budi. 2015. "Pengadaan Tanah Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Di Kabupaten Cilacap)". *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 1 No. 1.
- Ismail, Nurhasan. 2011. "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat (Political Direction of Land Law and Protection of People's Land Ownership)". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1 No. 1.
- Kalo, Syafrudin. 2005. "Reformasi Peraturan dan Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 24 No.1.

- Kondarus. 2006. "Quo Vadis Perpres No. 36 Tahun 2005". *Jurnal Keadilan*. Vol. 4 No.3.
- Land Title Protection to Realize People's Welfare". *Journal of Law, Policy and Globalization*. Vol. 51.
- Lisdiyono, Edy. 2011. "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Implikasinya terhadap Alih Fungsi Lahan dan Penataan Ruang". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*. Vol. 9 No.1.
- Muwahid. 2015. "Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 5 No. 2.
- Pangemanan, Estevina. 2013. "Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah". *Lex Privatum*, Vol. I No. 4.
- Pessak, Romana Octavia Debora. 2017. "Penerapan Hukum standar Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum." *Lex Administratum*. Vol. V. No. 3.
- Rainoer, Adi Sulistiyono, Rachmi, IGK Ayu. 2016. "Legal Political Model of
- Sandy, I Made. 1991. "Catatan Singkat tentang Hambatan-Hambatan Pelaksanaan UUPA". *Jurnal Analisis CSIS*. Tahun XX No.2.
- Santoso, Urip. 2016. "Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Perpektif*. Vol. XXI No. 3.
- Saturnino, M. Borrás. Jr and Franco, Jennifer C. 2011. "Global Land Grabbing and Trajectories of Agraria Change: A Preliminary Analysis." *Journal of Agraria Change*. Vol. 11 No.1.
- Subekti, Rahayu. 2016. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Yusticia*. Vol 5. No 2.

- Sumardjono, Maria S.W. 2008. "Reorientasi Kebijakan Pertanahan", (dalam Supriyanto, "Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional"). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3.
- Surajiyo. 2018. *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*. IKRAITH-humanira Vol 2 No 3.
- Surono, Agus. 2017. "Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal". *Jurnal De Jure*.
- Sutanto, DN. 2013. "Asas-Asas Pengadaan Tanah". *e-Journal*. Fakultas Hukum, UAJY Yogyakarta.
- Urip, Santoso. 1998. "Aspen Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Pro Justitia*. Tahun XVI. No. 4.
- Warassih, Esmi dalam Ismayawati, Any. 2011. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6 No.1.
- Wiryani, Fifik. 2005. "Implikasi Pengaturan Hak Masyarakat Adat di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ambiguitas dan Tidak Sinkron". *Jurnal Legalitas*. Vol. 12 No.2.
- Yanto Sufriadi, Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum(Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu), *Jurnal Hukum*, Nomor 1, Volume 18 Januari 2011.

### **PeraturanPerundang-Undangan**

- Peraturan Pemerintah tentang Acara Penetapan Ganti Rugi oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda- Benda yang Ada di Atasnya. PP Nomor 39 Tahun 1973;
- Peraturan Presiden 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres Nomor 3 Tahun 2016;

Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah. PP Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

Peraturan Presiden tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres Nomor 101 Tahun 2016.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang tentang Penataan Ruang. UU Nomor 26 Tahun 2007;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di atasnya. UU Nomor 10 Tahun 1961;

Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. UU Nomor 2 Tahun 2012;

Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960;

untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Nomor. Perpres No 148 Tahun 2015;

## **Makalah Seminar/Lokakarya/Pidato Pengukuhan Guru Besar/ Desertasi/ Laporan**

- \_\_\_\_\_. 2003. "Analisa Yuridis Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
- \_\_\_\_\_. 1994. "Aspek Yuridis Keppres 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaannya". (Makalah yang disampaikan pada seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk pembangunan), 3 Desember 1994.
- \_\_\_\_\_. 1998. "Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara". *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UGM. Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria dan Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta: Penerbit Insist Press. Hlm. 23.
- Abduh, Muha mmad. 1988. "Propil Hukum Administrasi Negrara Indonesia (HANI) dikaitkan dengan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)". *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, dalam Mata Pelajaran Hukum Administrasi Negara. pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. yang diucapkan pada tanggal 11 Oktober 1988*.
- Abna, Bachtiar & Dat"o Rajo Sulaiman. 2007. "Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat", disampaikan pada Loka Karya Badan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara Pembangunan Nasional & Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Padang, Sumatra Barat.
- Antje, M. Ma"moen. 1996. "Pendaftaran Tanah sebagai Pelaksana Undang- Undang Pokok Agraria untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak atas Tanah di Kota Madya Bandung". *Disertasi*. Bandung: Universitas Padjajaran.

- Arie, Sukanti Hutagalung. 2013. "Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Narasumber, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Aslan, Noor. 2013. "Konsepsi Hak Milik Atas Tanah bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia". *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Atamimim, Hmaid S. 1996. "Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945". Makalah disampaikan dalam Seminar Dies Natalis, Universitas 17 Agustus yang ke-42. Jakarta: Universitas 17 Agustus.
- Atmoredjo, Sudjito. 2019. *Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia. Makalah Seminar Nasional, "Pembangunan Hukum Berkarakter Pancasila dalam Rangka Globalisasi Ekonomi Menyongsong Era Industri 4.0"*. Surakarta, 31 Agustus 2019: Prodi Magister Ilmu Hukum UNS.
- Bakri, Muhammad. 2007. "Implementasi Pengaturan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara". *Disertasi*. Jakarta: Surabaya: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Basah, Sjachran. 1983. "Permasalahan Arti Kepentingan Umum". *Majalah Hukum Pro Justitia*, Edisi Ke-18.
- Ediwarman. 2001. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan di Sumatra Utara". *Disertasi*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.
- Ernis, Yul. 2013. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: BPHN Kemenkum HAM.
- Fakih, Mansour. 1995. "Tanah, Rakyat dan Demokrasi". Yogyakarta: Forum LSM-LSMP.

- Gunanegara. 2006. "Pengadaan Tanah oleh Negara untuk Kepentingan Umum". *Disertasi*. Surabaya: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hajati, Sri. 2003. "Pengaturan Hak Atas Tanah kaitanya dengan Investasi". *Disertasi*. Surabaya: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hamid A, Attamin. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun waktu Pelita I-pelita IV". *Disertasi*. Jakarta: UniversitasIndonesia.
- Harsono, Soni. 1994. "Tanah Sebagai Komoditi Strategis dalam Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang II". Pidato Dies Universitas Muhammadiyah Yogyakarta XIII. Yogyakarta:UMY.
- Harsono, Budi. 2005. "Penyerahan Kewenangan Bidang Pertanahan Kepada Daerah Otonom". Makalah disampaikan dalam seminar 45 Tahun UUPA. Jakarta: Pusat Studi Agraria FH Usakti.
- Hutagalung, Arie Sukanti. 2005. "Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (*Khususnya Menyangkut pengertian Kepentingan Umum*)". Makalah disampaikan dalam seminar 45 Tahun UUPA. Jakarta: Pusat Studi Agraria FH Usakti.
- Koeswahyono, Imam. 2011. "Suatu Catatan Kritis Atas Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Nomor 1 Tahun 2011".*Makalah*.
- Limbong, Bernhard. 2011. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Penghormatan terhadap Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UniversitasPadjajaran.

- Muchsan. 1997. "Perbuatan Pemerintah dalam Memperoleh Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum". *Disertasi*. Yogyakarta:UGM.
- Mukmin Zakie. 2011. "Undang-Undang Pengambilan Tanah di Indonesia dan di Malaysia (Suatu kajian perbandingan)". *Disertasi*. Bangi: Fakultas Undang- Undang Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Mustamin, Hikmawaty. 2006. "Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah di Sulawesi Selatan". *Disertasi*. Makasar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi, *Hak Menguasai Dari Negara (HMN) Persoalan Sejarah Yang Harus Diselesaikan* dalam Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Usulan Revisi UUPA Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat Atas Sumber-sumber Agraria, Jakarta, 1998.
- Nurhasan, Ismail. 2006. "Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik". *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas GadjahMada.
- Prosterman, Roy & Robert Mithcell. 2014. "Dasar-Dasar Pemikiran Mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". Makalah disampaikan dalam *Land Law Initiative* USAID. Jakarta: USAID.
- Ronald, Titahelu. 1993. "Penetapan Asas-Asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat, Suatu Kajian Filsafat dan Teoretis Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia". *Disertasi*. Surabaya: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Sarjita. 2011. "Anatomi dan Kajian Kritis RUU Pengadaan Tanah". Makalah disampaikan pada workshop Nasional

Pertanahan Efisiensi Pengadaan Tanah di Tengah Penyerobotan dan Amputasi (Penetapan sebagai tanah terindikasi tanah terlantar) serta Bedah Bisnis RUU Pengadaan Tanah dan RUU Pertanahan Pasca Regulasi UU No 12 Tahun 2011". Jakarta.

Sasmitha, Tody dkk. 2014. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*. Yogyakarta: STPN Press, Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sodiki, Achmad. 1996. "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". Mkaalah disampaikan pada penatran dan lokakarya, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Soemardjono, Maria S.W. 1990. "Telaah Konseptual Terhadap Beberapa Aspek Hak Milik, Sebuah Catatan Untuk Makalah Chadidjah Dalimunte, Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA". *Makalah*. Seminar Nasional Hukum Agraria III. Medan: Badan Pertanahan Nasional Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Sofyan, Syafran. 2011. "*Supremasi Hukum dalam Rangka Mendukung Percepatan Daerah Tertinggal*". *Makalah Kuliah Hukum dan HAM*, Forkom Angkatan VI (Bupati, Walikota, Ketua DPRD). Jakarta: LemhannasRI.

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya". *Makalah yang disampaikan dalam diklat Penyelesaian Konflik Pertanahan Angkatan II, yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 11-16 April 2003*).

Widyantor, Bambang dan Rumata, Evi. 2011. "Das Sein dan Das Sollen dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Di Indonesia". *Majalah Ilmiah Solusi Unsika ISSN 1411-86676*. Vol. 10 No. 10.

## Data Elektronik

- Astuti, Puji. 2017. "Kekerasan dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara dalam Menciptakan Keadilan di Bidang Pertanahan", hlm. 51. Diakses dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3158/1834>, diakses 31 Maret 2017.
- KPA. 2017. Laporan Akhir Tahun Mengenai Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi Oleh Catahu pada bulan Desember Tahun 2017. diakses via [https://www.google.com/search//laporan akhir Tahun mengenai reforma agraria dibawahbayangan+investasi](https://www.google.com/search//laporan%20akhir%20tahun%20mengenai%20reforma%20agraria%20dibawahbayangan+investasi). diakses pada tanggal 10 Februari 2019.
- Rustamaji, Muhammad. 2017. *Pembaruan Hukum Terhadap Formulasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Konteks KeIndonesiaan (Kajian Normadan Nilai)*, Ringkasan Disertasi, (Semarang: UNDIP. 2017) hlm. 110. Diakses dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=E1xSkgUAAAAJ&hl=en>
- Sumardjono, Maria S.W. 2019. <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/2011/03/tinjauan-kritis-atas-uu-no-1-Tahun-2011/>. Diakses pada 1 Februari 2019.
- Syamsiah. 2019. <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

## TENTANG PENULIS

### **Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.**

Lahir Biyolali 19 juli 1965 ..sejak kecil bercita cita menjadi seorang guru SD dan jd penegak Hukum, sempat berhenti kuliah karena fokus pada keluarga , kemudian bisa berlanjut kuliah sampe jenjang S2.di situlah awal karier menjadi asisten dosen 4 tahun dsn kemudian menjadi Dosen tetap di Universitas Boyolali sejak 2006, awal 2007 menjadi kaprodi FH UBY kemudian 2012 menjadi Dekan FH UBY sampe 2021, 2014 diberikan tugas tambahan menjadi dekan Fakultas Ekonomi sampe 2019 .kosentrasi Bidang hukum adalah hukum perdata, namun disertasi mengenai hukum agraria maka bertambah kosentrasi pada Hukum administrasi Negara karena Kedua Bidang hukum tersebut saling berkaitan , menjadi dosen adalah anugerah yg indah bagi saya karena selain cita" sejak kecil menjadi guru bisa mentrasfer ilmu yang ada kepada siapa saja yg membutuhkan sehingga hidup bermanfaat